



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012-2013**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2012**



**L A P O R A N**  
**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012-2013**  
**TANGGAL 5 S.D. 7 NOVEMBER 2012**

---

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal **31 Mei 2012**;
3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal **5 Juli 2011**;
4. Rapat koordinasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I s.d Komisi XI dan badan Legislasi DPR RI tanggal **4 Juli 2012**;
5. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 65/PIMP/IV/2011-2012 tanggal **13 Juli 2012** tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan kunjungan lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya serta *stake holder* terkait dengan realisasi dan pelaksanaan pembangunan sektor bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat, serta dukungan dan sinkronisasinya dengan program - program pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Berdialog langsung dengan masyarakat dan melihat langsung di lapangan realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Mendapatkan informasi langsung tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek legislasi (peraturan perundang-undangan), anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah bidang Komisi IV DPR RI dan alternatif pemecahan masalahnya.

- Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang Komisi IV DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

### C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH	KETUA TIM/F-PG
2	H. DARIZAL BASIR	ANGGOTA/F-PD
3	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	ANGGOTA/F-PD
4	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH.	ANGGOTA/F-PG
5	H. HARDISOESILO	ANGGOTA/F-PG
6	Hj. TETI KADI BAWONO	ANGGOTA/F-PG
7	IAN SIAGIAN	ANGGOTA/F-PDI-P
8	DRS. I MADE URIP, M.Si	ANGGOTA/F-PDI-P
9	HONING SANNY	ANGGOTA/F-PDI-P
10	IR. Hb. NABIEL AL MUSAWWA, M.Si	ANGGOTA/F-PKS
11	MA'MUR HASABUDDIN, MA	ANGGOTA/F-PKS
12	H. SUKIMAN, S.Pd., MM.	ANGGOTA/F-PAN
13	DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS.	ANGGOTA/F-PPP
14	PEGGI PATRICIA PATTIPI	ANGGOTA/F-PKB

### D. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada hari Senin - Rabu, tanggal 5 - 7 November 2012.

### E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

Acara dan lokasi yang dikunjungi dalam kunjungan kerja Tim Anggota Komisi IV DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, diwakili oleh Asisten Daerah II Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Peninjauan Gudang Bulog di Kabupaten Kubu Raya;
- Pertemuan dengan Bupati Melawi beserta jajarannya di Pendopo Rumah Jabatan Kabupaten Melawi;
- Peninjauan ke masyarakat sekitar areal PT. Inhutani III Kec. Nanga Pinoh dan Kec. Ella Kab. Melawi;

5. Peninjauan lapangan terhadap kegiatan Bina Desa Masyarakat di areal sekitar hutan (HPH Alas Kusuma Group) dan peninjauan Taman Nasional Bukit Baka;
6. Pertemuan dengan Bupati Sintang beserta jajarannya di Pendopo Kabupaten Sintang;
7. Peninjauan Gudang Bulog Kabupaten Sintang;
8. Peninjauan ke lokasi cetak lahan sawah di Kecamatan Bukit kelam Permai Kabupaten Sintang;
9. Peninjauan ke Balai Benih Ikan di Kecamatan Bukit kelam Permai Kabupaten Sintang;

## **F. GAMBARAN UMUM**

1. **Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, diwakili oleh Asisten Daerah II Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Kalimantan Barat. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Prov. Kalbar dalam pembangunan Pertanian diantaranya adalah kegiatan Food Estate sebagai kegiatan prioritas, yaitu *Rice Estate* dan *Corn Estate*, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan dan pembinaan, pengawalan terhadap hama dan penyakit, serta penggunaan benih unggul bermutu.

Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Pertanian juga sudah dilaksanakan meskipun luas arealnya masih terbatas karena keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya dapat memperbaiki kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, misalnya perbaikan sarana pengairan (saluran irigasi). Di samping itu upaya pembangunan sarana pengairan di tingkat usaha tani seperti Tata Air Mikro (TAM) masih diprioritaskan pada wilayah-wilayah sentra produksi terutama padi, sedangkan untuk sarana berupa alsintan didukung dengan adanya program bantuan Alat dan Mesin Pertanian serta pemberdayaan kelompok UPJA agar dapat mengoptimalkan alsintan yang telah dimiliki.

Kalimantan Barat memiliki kinerja perkebunan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan masalah perizinan, antara lain:

1. Masih ditemui Tumpang tindih lahan antara izin perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan, dan izin usaha pertambangan serta lahan masyarakat.

2. Perizinan usaha perkebunan yang telah dikeluarkan belum sepenuhnya mengacu pada SK Menhutbun nomor 259 Tahun 2000 dan Permentan nomor 26 Tahun 2007.
3. Masih terdapat perusahaan perkebunan yang tidak melakukan aktifitas/tidak aktif, tidak segera dicabut izinnya.
4. Kewajiban perusahaan perkebunan membangun kebun masyarakat serendah-rendahnya 20% dari luas kebun yang diusahakan oleh perusahaan inti sesuai dengan Permentan nomor 26 Tahun 2007 pasal 11 masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan.
5. Belum semua perusahaan perkebunan dilakukan penilaian usaha perkebunan sesuai Permentan 07 Tahun 2009 karena keterbatasan SDM dan Sumber Dana.
6. Rendahnya realisasi kepemilikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) akibat daripada keterlambatan permohonan yang diajukan oleh perusahaan perkebunan.

### **Kehutanan**

Beberapa permasalahan yang ditemui terkait dengan pengelolaan hutan, antara lain:

- a. Belum mantapnya batas kawasan hutan.
- b. Belum mantapnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.
- c. Belum memadainya database untuk perencanaan kehutanan.
- d. Terbatasnya SDM yang profesional dibidang kehutanan.
- e. Belum optimalnya operasi pengamanan dan perlindungan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- f. Belum optimalnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
- i. Terbatasnya kemampuan tenaga pengamanan, pengawasan peredaran hasil hutan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- j. Sulitnya mendapat lahan yang *clean and clear* untuk pembangunan kehutanan.
- k. Tidak seimbangya kapasitas industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kemampuan produksi lestari sumber daya hutan Kalimantan Barat.

Adapun kegiatan Revitalisasi Kehutanan dalam rangka memfasilitasi berkembangnya usaha (agribisnis kehutanan) meliputi:

- 1) Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,
- 2) Rehabilitasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat,
- 3) Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Hutan,

Potensi sumberdaya laut dan perikanan yang dapat dikembangkan dan dikelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat antara lain;

1. Pengembangan usaha perikanan tangkap;
2. Pengembangan usaha budidaya ikan laut dan payau,
3. Pengembangan wisata berbasis kelautan dan perikanan atau yang lebih dikenal dengan wisata bahari; dan
4. Pengembangan industri garam daerah yang perlu dikaji terus kesesuaian lokasinya.

Disamping itu, pengembangan energi listrik berbasis kelautan juga sangat mungkin untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil agar tidak ketinggalan secara ekonomi dengan masyarakat yang tinggal di pulau utama Provinsi Kalimantan Barat.

Potensi pengembangan usaha perikanan air tawar di perairan umum meliputi usaha perikanan tangkap dan budidaya di sungai-sungai, danau, pagong alam, rawa dan genangan air lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, juga tidak kalah besarnya dengan potensi pengembangan usaha perikanan budidaya yang mencapai 2.252.932 ha. Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai provinsi dengan seribu sungai memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) jenis-jenis ikan air tawar yang sangat besar dan diantaranya memiliki nilai ekonomis sangat tinggi seperti; ikan semah, ikan jelawat, ikan entukan, ikan patin, ikan belida, ikan arwana, ikan botia dan masih banyak jenis ikan air tawar ekonomis penting lainnya. Pengembangan usaha perikanan budidaya air tawar dapat dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan membuat kolam ikan, menggunakan keramba atau keramba jaring apung yang ditempatkan di perairan umum seperti sungai dan danau, serta menggunakan sistem pengelolaan perairan umum berbasis perikanan melalui penebaran ikan (*restocking*) ke perairan umum dan selanjutnya dikelola bersama oleh masyarakat dan dapat dipanen setelah melewati periode waktu tertentu dimana ikan-ikan yang ditebar tersebut dianggap sudah dewasa dan layak untuk dikonsumsi.

Beberapa permasalahan di bidang ketahanan pangan yang mengemuka pada saat ini khususnya di Kalimantan Barat antara lain:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas;
- 2) Masih terjadinya kasus-kasus kerawanan pangan di sejumlah daerah walaupun data secara makro produksi beras sudah mencukupi;
- 3) Terjadinya kasus-kasus penggunaan tambahan zat berbahaya pada makanan;
- 4) Terjadinya degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang mengancam dan secara nyata akan mempengaruhi kapasitas produksi pangan daerah;

- 5) Sarana Prasarana Distribusi yang sangat kurang mendukung, sampai pada yang parah beberapa daerah menjadi terisolir;
- 6) Bencana Alam yang terjadi cukup merata di hampir semua wilayah;
- 7) Perkembangan perdagangan regional dan global yang berpengaruh pada fluktuasi harga pangan termasuk di daerah.

Demikian berbagai permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan untuk mendapat perhatian dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

## **2. Peninjauan Gudang Bulog di Kabupaten Kubu Raya, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:**

Realisasi penyaluran Raskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 mencapai 4.356.720 Kg (100%) dari pagu yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Tahun 2012 ini telah ditetapkan pagu dan rencana pendistribusian sebesar 51.374.400 Kg ke seluruh kabupaten/kota se-Kalbar dan telah terealisasi sekitar 80%. Komposisi beras diperoleh dari lokal 40% dan impor 60%.

Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan Program Raskin Tahun 2012 antara lain:

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat Raskin berdasarkan data BPS lebih sedikit dari jumlah penerima manfaat Raskin yang sesungguhnya, akibatnya banyak keluarga miskin yang tidak mendapat jatah beras raskin sesuai ketentuan.
2. Tingkat harga yang dibayar oleh penerima manfaat raskin pada realisasinya terkadang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah, meskipun merupakan kesepakatan bersama antara petugas pelaksana distribusi dan keluarga penerima manfaat. Hal ini karena adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh petugas di titik distribusi, antara lain biaya transport dari titik distribusi ke penerima manfaat.
3. Luasnya wilayah operasional yang tersebar di 14 kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan dan Desa/Titik Distribusi per-kabupaten/kota serta tingginya tingkat kesulitan medan jalur angkutan.
4. Faktor cuaca/kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kelancaran pendistribusian beras Raskin ke titik distribusi:
  - Jalur sungai sangat tergantung kepada pasang-surutnya sungai, khususnya di Kab. Sintang dan Kapuas Hulu.
  - Jalur darat ke beberapa kecamatan di daerah pedalaman dan perhuluhan, pada musim hujan kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan roda empat/truk karena pada umumnya masih berupa jalan tanah setapak.
  - Jalur laut pada bulan-bulan tertentu terdapat musim gelombang/ombak besar sehingga berdampak terhadap waktu pendistribusian, sehingga pembagian jatah beras raskin dipercepat

(sekaligus 3 bulan sekali) khususnya di beberapa desa di Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara.

**3. Pertemuan dengan Bupati Melawi beserta jajarannya di Pendopo Rumah Jabatan Kabupaten Melawi;** beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Kabupaten Melawi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sintang

Permasalahan yang ditekankan oleh Bupati Melawi adalah terkait usulan RTRWP. Dari usulan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain seluas 200.000 ha, namun oleh Tim Terpadu disetujui hanya 135.000 ha. Hal ini sangat menghambat pembangunan di Kabupaten Melawi mengingat 70% dari luas kabupaten Melawi merupakan Kawasan Hutan. Sekitar 30% nya ditempati oleh 220.000 penduduk yang terdiri dari 40.000 KK.

**4. Peninjauan ke masyarakat sekitar areal PT. Inhutani III Kec. Nanga Pinoh dan Kec. Ella Kab. Melawi;** beberapa hal penting yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa antara lain:

- a. Bahwa PT. INHUTANI III Unit Nanga Pinoh sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 telah melakukan kegiatan operasional, namun tidak dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak membawa dampak ekonomi maupun sosial terhadap warga masyarakat yang berada di dalam kawasan atau area tersebut.
- b. Bahwa dari tahun 1998 sampai tahun 2012 (sekarang) tidak ada sama sekali kegiatan, sehingga lahan-lahan tersebut ditumbuhi oleh semak belukar, alang-alang dan tumbuhan liar lainnya (lahan terlantar)
- c. Bahwa dalam keadaan lahan yang ditumbuhi oleh semak belukar dan ilalang tersebut mengakibatkan sering terjadi kebakaran terutama pada musim kemarau (setiap tahun) sehingga kebun warga masyarakat yang berada disekitarnya pun ikut terbakar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- d. Bahwa PT. INHUTANI III Unit Nanga Pinoh dianggap masyarakat gagal mengemban amanah dari Kementerian Kehutanan RI untuk melaksanakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri jika memperhatikan:
  - Dari awal perizinan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, melalui Surat Keputusan Nomor: 250/Kpts-II/1986, dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.523/Menhut-II/2011, tentang Pemberian IUPHHK kepada PT. INHUTANI III Unit Nanga Pinoh, saat ini hutan tanaman industri sebagaimana yang dimaksud dan atau tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan dianggap tidak pernah terwujud.



- Areal/lahan sekarang sudah ditumbuhi ilalang dan semak belukar, bukan hutan pinus ataupun akasia.
  - Sampai hari ini tidak ada operasional di lapangan yang dilakukan oleh pihak PT. INHUTANI III Unit Nanga Pinoh.
- e. Masyarakat yang berdomisili dalam kawasan hutan produksi merasa sangat tidak diuntungkan karena tidak dapat membuat sertifikat hak milik (SHM) sehingga tidak mempunyai alasan kuat untuk membangun perumahan, properti keperdataan dan fasilitas umum lainnya. Selain itu masyarakat juga tidak dapat memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai tanaman komoditi perkebunan yang dapat membawa dampak positif dan nyata terhadap kelangsungan ekonomi serta sosial warga masyarakat yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap tersebut.

Oleh karena itu aspirasi yang disampaikan adalah:

- a. Meninjau kembali, dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 250/Kpts-II/1986, tanggal 18 Agustus 1986 dan Surat Keputusan Nomor: SK.523/Menhut-II/2011 tertanggal 13 September 2011.
- b. Mengubah fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
- c. Menyerahkan kembali penggunaan dan pengelolaan lahan kepada Masyarakat Adat setempat.

**5. Peninjauan lapangan terhadap kegiatan Bina Desa Masyarakat di areal sekitar hutan (HPH Alas Kusuma Group) dan peninjauan Taman Nasional Bukit Baka;** beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Peninjauan ke  
Luas HPH yang diberikan 200.000 Ha.

**6. Pertemuan dengan Bupati Sintang beserta jajarannya di Pendopo Kabupaten Sintang;** beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Kabupaten Sintang mempunyai luas wilayah administratif 21.638,2 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 Kecamatan, 281 Desa dan 6 Kelurahan. Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 363.978 jiwa, dengan kepadatannya rata-rata 27 jiwa/km. Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Peran sektor primer (Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan) dalam PDRB Kabupaten Tahun 2011 sebesar 42,08%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 5,38%. Pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2011 sebesar Rp 9,33 juta. Total potensi sawah dan ladang di Kabupaten Sintang adalah 36.566 ha (ladang 14.189 ha dan sawah 22.377 ha) dengan

produktivitas rata-rata 1,57 ton/ha untuk padi ladang dan 5,2-6 ton/ha untuk padi sawah.

Selama tahun 2012 ketersediaan pangan sudah memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam 4 tahun terakhir pemasukan beras mengalami penurunan rata-rata 35%. Distribusi pangan serta rata-rata harga bahan pangan relatif stabil: harga beras berkisar antara Rp. 7000,-/Kg – Rp. 8.000,-/Kg, jagung Rp. 3.000,-/Kg, ikan Rp. 15.000,-/Kg – Rp. 40.000,-/Kg, daging Rp. 80.000,-/Kg – Rp. 90.000,-/Kg, dan daging unggas Rp. 25.000,-/Kg – Rp. 30.000,-/Kg. Produksi padi sawah 2011 sebesar 72.164 ton, sedangkan produksi padi ladang sebesar 22.281 ton.

Permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sintang adalah tingkat produktifitas komoditi pangan masih rendah, pengelolaan lahan serta sumber daya pertanian belum optimal, pola konsumsi pangan masih didominasi oleh beras, dan pola pengembangan usaha tani masih bersifat monokultur.

Pelaksanaan Kebutuhan Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Sintang Tahun 2010 sejumlah 29 Unit yang tersebar 29 Desa di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sintang. Tahun 2012 setiap Unit Pembangunan KBR melaksanakan pembuatan bibit tanaman dengan jenis tanaman sesuai dengan yang menjadi keinginan masyarakat setempat dengan jenis al : Karet , Gaharu, Trembesi, Sengon, Durian, Sungkai, Petai, dan Nyatoh. Sasaran lokasi penanaman KBR adalah hutan rakyat seluas 1.650 Ha dan fasilitas umum seluas 2.000 ha. Permasalahan yang dihadapi dalam program KBR antara lain:

- Kemampuan pembinaan kurang maksimal yang disebabkan keterbatasan personil petugas penyuluh pembinaan KBR,
- Keterbatasan anggaran sehingga pembinaan tidak maksimal,
- Tata waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sesuai rencana pelaksanaan,
- Kondisi alam/ topografi lokasi KBR yang jauh dari fasilitas sarana dan sarana (infrastruksur yang minim).

## **7. Peninjauan Gudang Bulog Kabupaten Sintang ; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:**

Realisasi penyaluran Raskin oleh Perum Bulog Sub Divre Sintang adalah 3.344.595 Kg dari target penyaluran tahun 2012 sebesar 5.084.145 Kg, sehingga masih terdapat Raskin yang belum tersalurkan sebanyak 1.739.550 Kg. Jumlah RTS adalah 31.446 KK pada penyaluran Januari – Mei, dan 25.959 KK pada penyaluran Juni – Desember. Bupati Sintang menyampaikan bahwa alokasi Raskin minta untuk dikurangi karena Masyarakat Sintang banyak yang mampu.

Rencana Pengadaan Tahun 2012 sebesar 100 ton beras, namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Kendala yang dihadapi yaitu harga dasar

pembelian beras oleh Pemerintah sebesar 6.600/kg dimana harga tersebut masih berada jauh dibawah harga pasaran umum yaitu antara Rp. 7.000 s/d Rp. 7.500. Di tahun 2013, dengan adanya pencetakan sawah baru oleh Pemerintah di Kabupaten Sintang diharapkan rencana pengadaan sebesar 100 ton dapat terealisasi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyerapan beras lokal yang masih rendah. Terdapat tambahan biaya harga pembelian raskin sebesar Rp. 350,- untuk biaya distribusi dan transportasi ke Kabupaten Sintang.

**8. Peninjauan ke lokasi cetak lahan sawah di Kecamatan Bukit kelam Permai Kabupaten Sintang;** beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Cetak sawah di Kecamatan Bukit kelam dilakukan sejak.... sistem irigasi mengandalkan dari air hujan (sawah tadah hujan), dengan menerapkan sistem budidaya semi organik dengan menggunakan pupuk Phonska. Produktivitas padi rata-rata mencapai 6 ton/ha/tahun. Kendala yang dihadapi di persawahan di kecamatan bukit kelam ini adalah tingkat keasaman tanah yang cukup tinggi. Untuk menetralsisir keasaman, petani menggunakan kapur Dolomite.

Aspirasi: perlu balai pertemuan / saung untuk petani, petani juga memerlukan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsin) untuk mengelola sawah yang cukup luas.

**9. Peninjauan ke Balai Benih Ikan di Kecamatan Bukit Kelam Permai Kabupaten Sintang;** beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Kunjungan ke

## **G. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan di provinsi Kalimantan Barat.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk

- Memberikan pembinaan dan dukungan anggaran untuk penguatan kapasitas permodalan program PUAP dan LM3 hortikultura bagi Petani bunga krisan di Wilayah Bandungan kabupaten Semarang. Selanjutnya Komisi IV meminta kepada Dinas Pertanian setempat untuk membantu dan mendampingi proses pengusulan untuk program tersebut.
  - Membantu masyarakat petani Dieng dalam hal promosi dan pemasaran komoditas asli pertanian Dieng, memberikan bantuan dan bimbingan teknis alternatif tanaman pengganti kentang yang menguntungkan serta dapat menunjang konservasi tanah dari erosi, serta membantu dalam hal jaminan mutu hasil pertanian agar petani Dieng mampu bersaing dalam mengeksport produk hasil pertanian mereka.
  - Merumuskan strategi jaminan pasar dan harga pembelian beras oleh pemerintah.
  - Melakukan pendampingan teknis dan menyediakan akses informasi pasar bagi kelompok penerima UPPO agar dapat menjual pupuk organik dengan mudah.
  - Menyediakan alokasi Alsin berupa Pompa Air ke kelompok tani di Klaten bagian timur selatan agar dapat mengalirkan air sawah irigasi teknis dari saluran Wonogiri.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dan pendampingan intensif dengan masyarakat petani setempat dalam program pemulihan kawasan Dieng, sehingga program dapat berjalan secara efektif.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan teknis sebagai tindak lanjut program PUMP dalam hal peningkatan kemampuan manajerial kelompok pembudidaya ikan, seperti pembelian pakan secara kolektif oleh kelompok.

## **H. PENUTUP**

Terhadap beberapa aspirasi dari mitra kerja/pemerintah daerah dan tanggapan dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti dengan menyampaikan baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Beberapa program pembangunan yang diusulkan langsung dan atau tertulis oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah selama kunjungan kerja ini agar

dapat ditindak lanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait khususnya dalam APBN Tahun 2012 - 2013.

Jakarta, 24 November 2012

KOMISI IV DPR RI  
KETUA TIM,

**FIRMAN SOEBAGYO, SE. MH.**  
A-224